

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi Anggaran

2.1.1 Defenisi Akuntansi Anggaran

Defenisi akuntansi anggaran mencakup defenisi akuntansi dan anggaran. Menurut Garrison, Norren and Brewer (2006:4), “Anggaran adalah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode tertentu.” Sedangkan akuntansi adalah proses pencatatan terkait transaksi keuangan yang terjadi di sebuah objek serta pengolahan data transaksi tersebut yang menghasilkan *output* berupa informasi kepada pihak tertentu. Marliyati, F. A. (2014) melakukan penelitian bahwa akuntansi anggaran merupakan salah satu cara untuk dokumentasi terkait pertanggungjawaban serta pengendalian sesuai dengan struktur anggaran. Akuntansi anggaran diselenggarakan saat anggaran disahkan dan dialokasikan. Oleh karena itu penerapan akuntansi anggaran membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

2.1.2 Dasar Hukum Penerapan Akuntansi Anggaran

Dasar hukum penerapan akuntansi anggaran merupakan pedoman dalam melakukan akuntansi anggaran di instansi pemerintah. Dasar hukum tertinggi mengacu pada Undang – Undang Dasar 1945 mengenai belanja negara.

Landasan Hukum :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 3004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.1.3 Jurnal Standar Akuntansi Anggaran SKPD

Jurnal anggaran merupakan pencatatan atas transaksi yang terjadi dalam suatu periode yang mengakibatkan perubahan pada akun-akun yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran. Bagian jurnal anggaran yang terkait yaitu pendapatan LRA, belanja , transfer dan Pembiayaan. Pencatatan data anggaran ke dalam jurnal

yang bersumber dari DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) disajikan pada Tabel II.1.

Tabel II 1 Jurnal Anggaran Pendapatan dan Belanja di Awal Tahun Anggaran

Akun	Debit	Kredit
Estimasi Pendapatan A	XXX	
Estimasi Pendapatan B	XXX	
Estimasi Perubahan SAL	XXX	
Apropriasi Belanja C		XXX
Apropriasi Belanja D		XXX

Sumber : Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Akuntansi

Keuangan Daerah Tahun 2015

2.2 Definisi, Klasifikasi Penyusunan Anggaran

2.2.1 Definisi Penyusunan Anggaran

Penyusunan Anggaran termasuk bagian dari Akuntansi Pemerintahan. Bachtiar Arif, dkk (2002:3) mendefenisikan akuntansi pemerintahan sebagai aktifitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Penyusunan Anggaran merupakan rencana yang disusun oleh instansi secara sistematis dengan bentuk angka yang terkait dengan kegiatan di instansi tersebut untuk periode atau jangka waktu tertentu.

2.2.2 Klasifikasi Anggaran.

Klasifikasi anggaran adalah pengelompokan anggaran belanja untuk penyajian informasi dan penyusunan anggaran. Pengelompokan anggaran belanja dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Klasifikasi menurut organisasi

Klasifikasi anggaran menurut organisasi adalah klasifikasi belanja yang ditentukan sesuai dengan struktur organisasi entitas.

2. Klasifikasi menurut fungsi

Klasifikasi anggaran menurut fungsi adalah klasifikasi anggaran dengan rincian sesuai dengan kebutuhan fungsi dan sub fungsi. Terdapat 11 (sebelas) klasifikasi anggaran menurut fungsi yaitu pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan dan kebudayaan serta perlindungan sosial. Klasifikasi menurut fungsi dan sub fungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dikaitkan dengan kegiatan yang dilaksanakan.

3. Klasifikasi menurut ekonomi (Jenis Belanja)

Klasifikasi anggaran menurut ekonomi atau disebut juga jenis belanja pada dokumen anggaran baik berupa proses penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban maupun pelaporan anggaran, dibedakan menjadi 8 jenis belanja, yaitu :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pegawai pemerintah baik PNS, pegawai pemerintah yang belum berstatus PNS baik di dalam maupun luar negeri , dimana kompensasi diberikan dalam bentuk uang atau barang.

2. Belanja Barang

Belanja Barang adalah belanja yang dilakukan dengan pembelian barang atau jasa habis pakai, pengadaan barang baik untuk diserahkan atau dijual untuk

masyarakat dan belanja yang sesuai dengan kebutuhan entitas berupa barang yang kriterianya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Belanja barang terdiri dari belanja operasional dan non operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, serta belanja perjalanan dinas.

3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran atau belanja untuk menambah nilai asset tetap dan asset lainnya dengan kriteria memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi serta memenuhi kriteria nilai batas minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya.

4. Bunga Utang

Bunga utang yaitu pembayaran yang dilakukan baik utang dalam maupun luar negeri untuk pemenuhan pembayaran bunga dari pokok utang yang khususnya digunakan pada kegiatan dari bagian anggaran BUN (Bendahara Umum Negara)

5. Belanja Subsidi

Belanja subsidi adalah belanja yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak dengan mengalokasikan anggaran kepada perusahaan tertentu (biasanya berkaitan dengan kebutuhan manusia) yang bertujuan supaya masyarakat dapat menjangkau harga jual tersebut.

6. Belanja Bantuan Sosial (Bansos)

Belanja Bantuan Sosial adalah anggaran yang ditransfer dalam bentuk barang, uang dan jasa dari Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat dengan tujuan memberikan bantuan kepada masyarakat apabila terjadi risiko bencana sosial.

7. Belanja Hibah

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2011 Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, dan jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.

8. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain adalah belanja diluar belanja pegawai, barang, modal, utang, subsidi, bansos, hibah yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan bersifat mendesak.

2.3 Proses Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan bagian laporan keuangan yang menyajikan terkait informasi atau ikhtisar untuk menggambarkan terkait perbandingan realisasi dan anggaran dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran termasuk komponen laporan keuangan pemerintah untuk periode tertentu yang menyajikan informasi tentang perbandingan realisasi dan anggaran entitas pelaporan, (Astria dkk:2015). Berikut unsur unsur yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran :

- 1) Pendapatan – LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/Defisit – LRA;

5) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Tujuan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran oleh Pemerintah untuk menyajikan informasi untuk menggambarkan perbandingan anggaran dan realisasinya sebagai tolak ukur penyerapan anggaran pemerintah untuk memperlihatkan tingkat pencapaian target anggaran yang telah disusun dan disepakati oleh pihak eksekutif dan legislatif. Unsur-unsur yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran diharapkan dapat menjadi evaluasi terkait akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dalam anggaran, keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi (Baswir, R . 2000).

Proses penyusunan LRA berkaitan dengan strukturnya yaitu menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan. Karakteristik untuk menyajikan laporan keuangan termasuk LRA adalah sebagai berikut :

1. Relevan

Informasi dalam Laporan Keuangan harus relevan karena hal tersebut dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Setiap informasi yang relevan membantu dalam mengevaluasi kejadian masa lalu, sekarang, dan masa depan atau bahkan dapat dijadikan koreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu.

2. Andal

Laporan keuangan harus disajikan dengan andal, tidak menyesatkan, dan bebas dari kesalahan material. Penyajian tersebut harus dilakukan dengan jujur dan

dapat diverifikasi, dengan kata lain andal yang dimaksud yaitu informasi keuangan tersebut sesuai dengan keadaan di lapangan (instansi).

3. Dapat dibandingkan

Laporan Keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, atau lebih baik jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pemerintah daerah lain.

4. Dapat dipahami

Setiap informasi dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dari laporan itu sendiri. Laporan Realisasi Anggaran entitas pelapor tentu harus diidentifikasi dengan jelas mengenai, hal hal yang diidentifikasi mengenai hal berikut :

1. nama entitas pelaporan beserta cakupan entitas pelaporan tersebut ;
2. waktu atau periode laporan yang dicakup ;
3. mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas ;
4. satuan angka yang digunakan oleh entitas dalam LRA.

Langkah yang dilakukan dalam penyusunan LRA yaitu memastikan seluruh jurnal transaksi baik jurnal umum, jurnal koreksi, dan jurnal penyesuaian setiap pendapatan dan belanja sudah diposting secara keseluruhan.

2.4 Penyajian dan Pengungkapan Laporan Realisasi Anggaran

Asumsi dasar pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah yaitu asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, asumsi keterukuran dalam satuan uang. Hal ini berpedoman pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. LRA merupakan laporan yang menyandingkan realisasi pendapatan

LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran meliputi informasi seperti dibawah ini :

1. Akuntansi anggaran

Akuntansi anggaran berkaitan dengan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dilaksanakan ketika anggaran tersebut telah disahkan. Akuntansi anggaran bertujuan dengan menyandingkan anggaran yang dialokasikan dengan yang sebenarnya.

2. Akuntansi Pendapatan – LRA

Akuntansi Pendapatan-LRA disajikan berdasarkan azas bruto. Yang dimaksud dengan azas bruto adalah saat melakukan pembukuan penerimaan tidak dicatat sebesar jumlah netonya. Pendapatan-LRA diakui ketika diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Jika terjadi pengembalian atas penerimaan pendapatan-LRA yang bersifat sistemik dan berulang saat periode penerimaan ataupun periode sebelumnya, maka dalam pembukuan akan dicatat sebagai pengurang pendapatan-LRA. Apabila koreksi dan pengembalian penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang saat periode tersebut maka dalam pembukuan dicatat sebagai pengurang pendapatan-LRA tahun (periode) yang sama, sedangkan koreksi dan pengembalian penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang saat periode sebelumnya maka dibukukan sebagai pengurang saldo anggaran lebih pada tahun (periode) saat koreksi ditemukan.

3. Akuntansi Belanja

Akuntansi belanja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban serta pengendalian manajemen dalam mengukur efektifitas dan efisiensi dengan realisasi

anggaran belanja dilaporkan berdasarkan penetapan klasifikasi yang tersedia pada dokumen anggaran. Apabila terjadi koreksi atas pengeluaran belanja saat periode tersebut akan dibukukan sebagai pengurang belanja periode yang sama. Namun, jika diterima di periode berikutnya, koreksi tersebut akan dibukukan dalam pos pendapatan lain-lain-LRA bagian pendapatan-LRA.

4. Akuntansi Surplus/Defisit-LRA

Selisih lebih pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan disebut dengan Surplus-LRA dan sebaliknya selisih kurun pendapatan-LRA dan belanja dalam satu periode pelaporan disebut dengan Defisit-LRA

5. Akuntansi Pembiayaan

Akuntansi pembiayaan terdiri dari 2 yaitu akuntansi penerimaan pembiayaan dan akuntansi pengeluaran pembiayaan. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilakukan dengan azas bruto serta diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum/Daerah, sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum/Daerah.

6. Akuntansi Pembiayaan Neto

Selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam satu periode baik selisih lebih/kurang dicatat sebagai Pembiayaan Neto.

7. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Selisih yang berasal dari realisasi pendapatan-LRA dan Belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan baik selama satu periode dilaporkan ke dalam Pos SiLPA/SiKPA.